

PROFIL PERTANIAN TAHUN 2023



**Jl. Majapahit Komplek Perkantoran
Cangakan, Karanganyar Kode Pos 57712
Telp. (0271) 495142, 494801, Fax. (0271) 494801.
E-mail: dispertanpp@karanganyarkab.go.id**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah, SWT atas rahmat dan perkenan-Nya sehingga Buku Profil Pertanian Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dapat diselesaikan. Buku Profil Pertanian Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ini menggambarkan kondisi pertanian di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2023 melalui integrasi berbagai data dikumpulkan dari berbagai sistem pencatatan dan pelaporan yang ada serta data gambaran umum dari lintas sektor terkait tertuang dalam Buku Profil Pertanian Kabupaten Karanganyar.

Ir. SITI MAISYARACH, M.Si.

*Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Karanganyar*

Penyusunan Buku Profil Pertanian mengacu pada pedoman teknis penyusunan profil pertanian Tahun 2023. Profil pertanian Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu sarana evaluasi pembangunan pertanian untuk perencanaan pembangunan pertanian selanjutnya termasuk penilaian kinerja dari penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pertanian di Kabupaten Karanganyar.

Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas kerjasama dan dukungan berbagai pihak yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), BPP se-Kabupaten Karanganyar dan pihak-pihak lain yang berkontribusi selaku sumber data profil pertanian ini, sehingga Buku Profil Pertanian ini telah dapat tersusun dengan baik.

Besar harapan kami, Buku Profil Pertanian ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan oleh pengambil kebijakan, unit/instansi/lembaga maupun berbagai pihak yang memerlukan untuk pengambilan kebijakan dan pengembangan pembangunan pertanian di Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa Buku Profil Pertanian ini belum sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami perlukan untuk penyempurnaan penyusunan profil di tahun mendatang. Semoga Allah, SWT senantiasa memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua.

Karanganyar, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Karanganyar

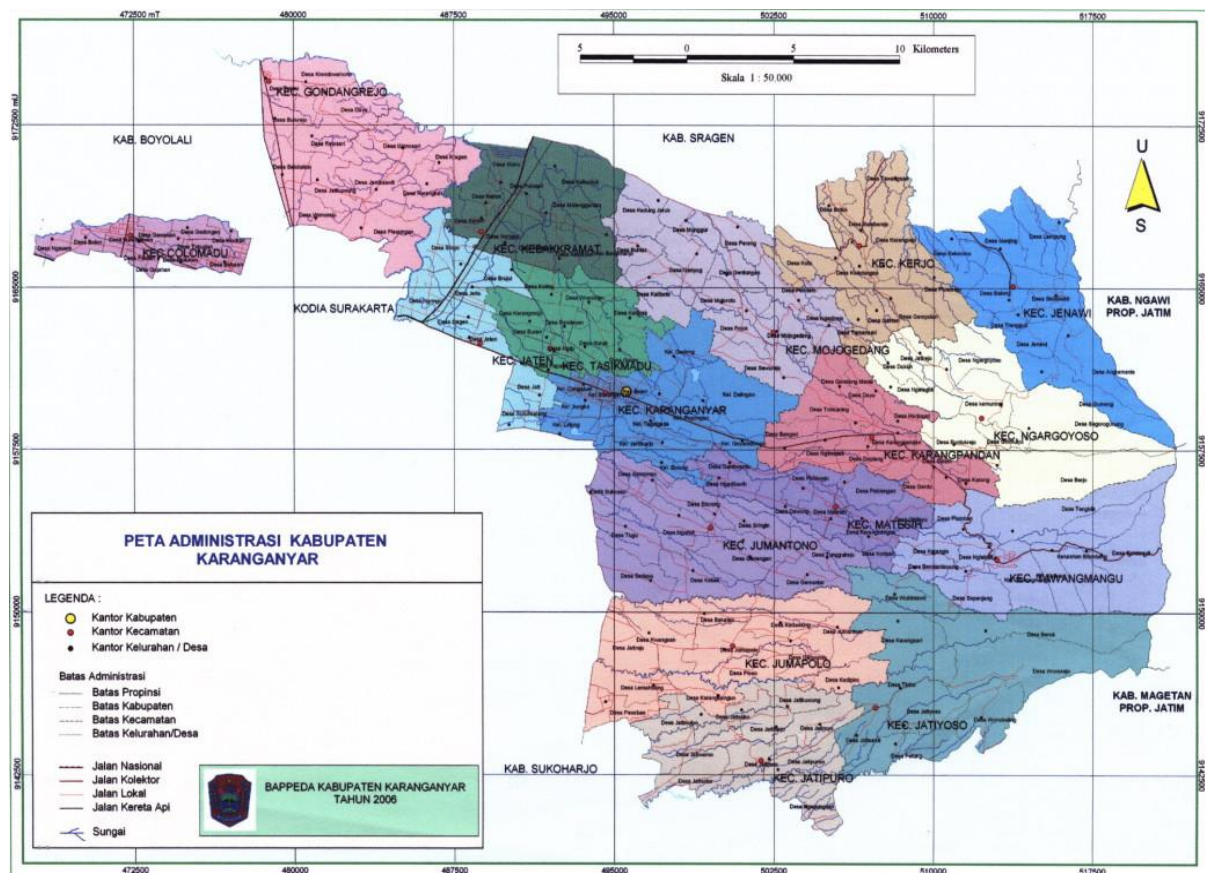
1

Ir. SITI MAISYARACH, M.Si.
NIP. 19640525 198912 2 001

BAB I
GAMBARAN UMUM

1. KEADAAN GEOGRAFI

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat. Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar terletak antara 110°40” - 110°70” Bujur Timur dan 7°28” - 7°46” Lintang Selatan. Ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22° - 31°. Wilayah terendah di Kabupaten Karanganyar berada di Kecamatan Jaten yang hanya 90 meter dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu yang mencapai 2000 meter di atas permukaan laut (BPS, 2015).



Gambar 1.1. Peta Kabupaten Karanganyar

2. LUAS WILAYAH

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.380,2 ha yang terdiri dari luas tanah sawah 22.668,2 ha, pertanian bukan sawah 30.601,1 ha dan luas lahan bukan pertanian 24.105,9 ha.

Tabel 1.1. Data Penggunaan Lahan Sawah, Pertanian Bukan Sawah dan Bukan Pertanian Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

No.	Kecamatan	Penggunaan Lahan
-----	-----------	------------------

		Sawah (Ha)	Pertanian Bukan Sawah (Ha)	Bukan Pertanian (Ha)	Total Luas Lahan (Ha)
1	Jatipuro	1.468,2	1.084,1	1.484,2	4.036,5
2	Jatiyoso	1.046,0	3.165,8	2.505,7	6.717,5
3	Jumapolo	1.668,0	1.769,0	2.130,0	5.567,0
4	Jumantono	1.595,0	2.091,6	1.668,8	5.355,4
5	Matesih	1.290,0	489,0	847,6	2.626,6
6	Tawangmangu	719,2	5.626,4	657,6	7.003,2
7	Ngargoyoso	690,0	5.007,8	836,1	6.533,9
8	Karangpandan	1.548,2	628,2	1.234,7	3.411,1
9	Karanganyar	1.703,2	571,4	2.028,0	4.302,6
10	Tasikmadu	1.682,0	78,7	999,0	2.759,7
11	Jaten	1.212,0	18,1	1.324,7	2.554,8
12	Colomadu	462,0	3,0	1.099,8	1.564,8
13	Gondangrejo	1.715,0	2.032,2	1.932,8	5.680,0
14	Kebakkramat	2.176,0	139,0	1.330,6	3.645,6
15	Mojogedang	2.024,8	1.233,1	2.073,0	5.330,9
16	Kerjo	1.129,6	2.344,7	1.208,0	4.682,3
17	Jenawi	539,0	4.324,0	745,3	5.608,3
	Jumlah	22.668,2	30.606,1	24.105,9	77.380,2

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 kecamatan, lahan sawah terbesar ada di Kecamatan Kebakkramat seluas 2.176 Ha dan lahan sawah terkecil ada di Kecamatan Colomadu 462 Ha. Lahan pertanian bukan sawah terbesar ada di Kecamatan Tawangmangu dan lahan pertanian bukan sawah terkecil ada di Colomadu seluas 3 Ha. Lahan bukan pertanian terbesar ada di Kecamatan Jatiyoso dan terkecil ada di Kecamatan Jenawi.

Tabel 1.2. Data Luas Penggunaan Lahan Sawah Menurut Kecamatan (hektar) Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

No.	Kecamatan	Realisasi ditanami padi			Ditanami Tanaman Lain (Ha)
		1 kali (Ha)	2 kali (Ha)	3 kali (Ha)	
1	Jatipuro	530	388,0	430,0	120,2
2	Jatiyoso	-	-	1.046,0	-
3	Jumapolo	477	198,0	696,0	297,0
4	Jumantono	-	1.031,0	430,0	134,0
5	Matesih	-	-	1.290,0	-
6	Tawangmangu	249	470,2	-	-
7	Ngargoyoso	-	-	285,0	405,0
8	Karangpandan	-	158,0	1.390,2	-
9	Karanganyar	-	768,0	907,0	28,2
10	Tasikmadu	4	237,0	1.441,0	-
11	Jaten	-	-	1.212,0	-
12	Colomadu	-	-	458,0	4,0
13	Gondangrejo	80	1.130,0	505,0	-
14	Kebakkramat	-	149,0	1.934,0	93,0
15	Mojogedang	-	64,3	1.960,5	-
16	Kerjo	-	-	1.089,6	40,0
17	Jenawi	-	-	498,0	41,0

Jumlah	1.340	4.593,5	15.572,3	1.162,4
--------	-------	---------	----------	---------

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan data diatas lahan sawah yang ditanami padi 3 kali tanam seluas 15.572, 3 Ha, 2 kali tanam seluas 4.593,5 Ha, dan 1 kali tanam seluas 1.340 Ha dan ditanami tanaman lain bukan padi seeluas 1.162, 4 Ha.

3. KEADAAN PENDUDUK KARANGANYAR

Aspek kependudukan merupakan masalah penting dalam perencanaan pembangunan, baik yang bersifat pembangunan sektoral, lintas sektoral maupun regional. Data kependudukan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Seiring dengan pembangunan yang terus dilaksanakan, jumlah penduduk juga mengalami perkembangan. Pada tahun 2022 jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar sebanyak 947.642 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,94 persen dari tahun sebelumnya.

Suatu ukuran tentang penduduk selain jumlahnya adalah komposisinya menurut jenis kelamin. Jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar laki-laki pada tahun 2022 berjumlah 472.414 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 471.228 jiwa sehingga Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*/RJK) menunjukkan angka 94,41 persen yang berarti diantara 100 orang penduduk perempuan terdapat 95 orang penduduk laki-laki. (Karanganyar Dalam Angka, 2023).

4. Potensi Pertanian Di Kabupaten Karanganyar

a. Tanaman Pangan

Tanaman padi merupakan komoditas utama di Kabupaten Karanganyar. Di Kabupaten Karanganyar sektor pertanian memiliki peranan yang penting bagi pertumbuhan ekonominya khusus subsektor tanaman, bahan makanan hasil produknya di samping untuk memenuhi kebutuhan sendiri juga dikirim ke wilayah sekitarnya.

1. Subsektor tanaman pangan di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3. Data Luas Tanam Padi Sawah Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar Dari Tahun 2020 s/d 2023 .

No	Kecamatan	Luas Tanam Padi Sawah (Ha)			
		2020	2021	2022	2023
1	Jatipuro	2.487	2.516,3	2.847	2.998
2	Jatiyoso	3.051	3.073,4	2.522	2.863
3	Jumapolo	3.046	2.868,8	3.242	3.889
4	Jumantono	2.810	2.822,4	2.993	3.397
5	Matesih	2.798	2.860,4	3.153	3.700
6	Tawangmangu	537	741,3	486	685
7	Ngargoyoso	591	526,3	914	836
8	Karangpandan	4.208	4.158,5	4.208	4.240
9	Karanganyar	4.079	4.160,8	3.688	4.308
10	Tasikmadu	5.127	4.847,4	3.834	4.997

11	Jaten	3.479	3.448,2	4.089	3.488
12	Colomadu	1.333	1.201,2	1.153	1.234
13	Gondangrejo	3.769	3.734,9	2.778	3.627
14	Kebakkramat	5.949	5.855,2	6.495	6.060
15	Mojogedang	4.663	4.818,4	4.173	5.021
16	Kerjo	3.228	3.273,8	2.709	2.884
17	Jenawi	1.638	1.703,1	1.141	1.270
Total		56.930	52.795	52.610	55.496

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

Data di atas dapat dilihat bahwa luas tanam padi tahun 2020 sebesar 56.930 ha, tahun 2021 sebesar 52.795 ha, tahun 2022 sebesar 52.610 ha dan tahun 2023 sebesar 55.496 ha.

Data Luas Panen Padi Sawah Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar Dari Tahun 2013 s/d 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Data Luas Panen Padi Sawah Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar Dari Tahun 2020 s/d 2023 .

No	Kecamatan	Luas Panen Padi Sawah (Ha)			
		2020	2021	2022	2023
1	Jatipuro	2.381	2.492,1	2.826	2.995
2	Jatiyoso	2.473	2.999,9	2.553	2.733
3	Jumapolo	2.692	2.659,7	2.834	3.928
4	Jumantono	2.967	2.822,4	2.642	2.899
5	Matesih	3.300	2.822,5	3.091	3.881
6	Tawangmangu	333	755,7	455	658
7	Ngargoyoso	837	540,6	922	774
8	Karangpandan	2.957	4.027,8	4.432	4.241
9	Karanganyar	3.694	4.187,8	3.700	4.266
10	Tasikmadu	3.172	5.121,8	3.685	4.513
11	Jaten	3.342	3.545,2	3.442	3.488
12	Colomadu	1.090	1.201,2	1.073	1.145
13	Gondangrejo	2.256	3.735,0	2.584	3.190
14	Kebakkramat	5.744	5.910,2	5.810	6.072
15	Mojogedang	4.839	4.832,9	4.275	4.556
16	Kerjo	2.879	3.330,1	2.699	2.869
17	Jenawi	1.098	1.814,6	1.108	1.259
Total		55.334	51.950	52.799	53.466

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

Luas panen padi pada tahun 2020 sebesar 55.334 ha, tahun 2021 sebesar 51.950 ha, tahun 2022 sebesar 52.799 ha dan tahun 2023 sebesar 53.466 ha.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar. Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perkebunan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Bidang Perikanan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. UPTD;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian dan bidang pangan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dispertan PP dan
- 5) Pelaksanaan fungsi tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi Dispertan PP.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian kegiatan,
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja,
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian;
- 4) Pengoordinasian tata laksana,
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,

- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa,
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kepala Bidang Pangan dan Hortikultura bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura,
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan dan hortikultura
- 4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

d. Bidang Perkebunan

Kepala Bidang Perkebunan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perkebunan.

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Perkebunan,
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Perkebunan
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Perkebunan
- 4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan,
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
- 4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan,
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

g. Bidang Ketahanan Pangan

Kepala Bidang Ketahanan Pangan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Ketahanan Pangan,
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Ketahanan Pangan
- 4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

h. Bidang Perikanan

Kepala Bidang Perikanan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan.

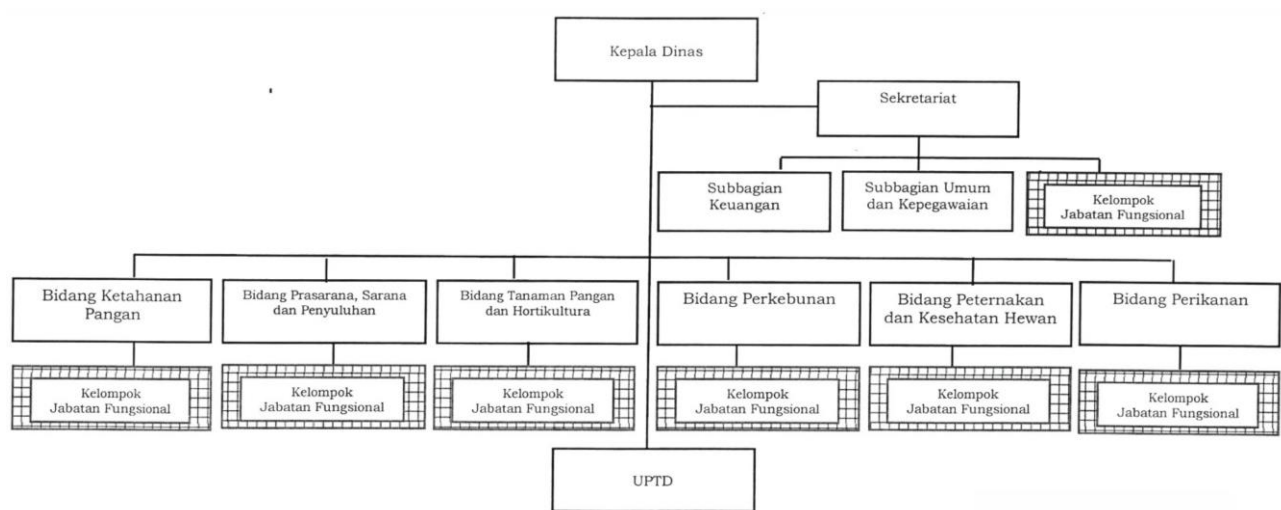
Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Perikanan,
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Perikanan
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan
- 4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

i. UPTD

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangnyar dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangnyar

2.2 Sumber Daya Perangkat daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Rekapitulasi data Pegawai berikut menggambarkan jumlah pegawai menurut golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, status kepegawaian pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan per Maret 2023:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan per Maret 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	19	3	15	1	17	6	61
3	D1	-	-	-	-	-	-	-

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
4	D3	6	2	7	2	15	3	35
5	S1	32	40	28	12	25	14	151
6	S2	14	11	-	-	1	-	26
7	S3	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan per Maret 2023

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	PNS - Golongan II	17	4	21
2.	PNS - Golongan III	37	40	77
3.	PNS - Golongan IV	16	13	29
4.	PPPK - Golongan V	15	1	16
5.	PPPK - Golongan VII	7	2	9
6.	PPPK – Golongan IX	28	12	40

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai tugas pokok Membantu Bupati Karanganyar dalam melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2017-2022 urusan pertanian dan pangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Hasil Komoditas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2022

URAIAN	SATUAN	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
URUSAN PANGAN							
Beras							
Ketersediaan	Ton	197.129	196.000	185.393	198.033	203.092	208.478
Kebutuhan	Ton	77.221	77.221	81.993	82.821	83.178	83.584
Jagung							
Ketersediaan	Ton	16.109	12.597	12.029	16.280	19.353	16.893
Kebutuhan	Ton	523	523	555	561	563	566
Kedelai							
Ketersediaan	Ton	249	830	269	462	462	336
Kebutuhan	Ton	17.222	17.222	18.287	18.471	18.551	18.641
SKOR PPH (POLA PANGAN HARAPAN)							
Padi-padian		18,7	25,0	23,5	24,8	23,8	22,9
Umbi-umbian		2,2	1,2	1,2	1,0	1,4	1,3
Pangan hewani		18,4	17,8	18,2	19,2	18,9	19,9
Minyak dan Lemak		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Buah/biji berminyak		1,0	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3
Kacang kacang		9,6	6,8	6,0	6,9	7,4	8,1
Gula		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sayur dan buah		30	24,1	23,3	25,8	23,8	29,2
Lain -lain		-	-	-	-	-	-
SKOR PPH KAB KARANGANYAR		87,1	82,9	80.1	85,7	83,2	89,2

URAIAN	SATUAN	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
URUSAN PERTANIAN							
Padi Sawah							
Luas	ha	52.991	52.639	51.601	55.334	56.036	54.962
Produksi	ton	331.781	342.558	318.853	333.306	341.820	342.002
Padi Gogo							
Luas	ha	-	-	-	-	-	-
Produksi	ton	-	-	-	-	-	-
Jagung							
Luas	ha	4.090	2.692	3.385	3.209	4.139	3.305
Produksi	ton	27.113	21.611	20.575	21.658	27.359	22.441
Kacang Tanah							
Luas	ha	1.533	1.101	1.445	1.901	1.813	1.760
Produksi	ton	2.266	2.077	2.078	3.280	3.173	3.151
Kedelai							

URAIAN	SATUAN	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Luas	ha	230	839	277	202	347	200
Produksi	ton	419	1.586	488	361	615	364
Ubi Jalar							
Luas	ha	894	720	587	753	699	569
Produksi	ton	33.920	28.370	22.273	29.203	27.345	23.403
Ubi Kayu							
Luas	ha	2.589	2.372	2.165	2.401	2.414	2.165
Produksi	ton	83.113	76.639	54.997	73.604	75.390	71207
Padi	ton/ha	6,26	6.51	6,17	6,02	6,10	6,20
Jagung	ton/ha	6,63	8.03	6,07	6,75	6,61	6,79
Kacang Tanah	ton/ha	1,48	1.89	1,44	1,72	1,75	1,79
Kedelai	ton/ha	1,82	1.89	1,76	1,79	1,77	1,82
Ubi Jalar	ton/ha	37,94	39,40	37,94	387,83	39,12	41,13
Ubi Kayu	ton/ha	32,10	32,31	25,40	30,65	31,23	32,89
Bawang Merah							
Luas	Ha	314	260	363	474	654	598
Produksi	Ton	2.787	2.054	3.126	3.689	5.681	4.808
Bawang Putih							
Luas	Ha	73	206	479	394	423	382
Produksi	Ton	800	1.677	2.762	2.631	2.098	4.180
Cabai Besar							
Luas	Ha	486	515	442	382	419	322
Produksi	Ton	2.610	2.722	2.827	2.692	4.915	2.305
Cabai Rawit							
Luas	Ha	183	176	178	120	163	126
Produksi	Ton	571	846	866	580	875	633
Tomat							
Luas	Ha	148	116	162	154	147	112
Produksi	Ton	1.681	1.687	2.012	2.557	3.455	1.673
Kubis							
Luas	Ha	257	192	297	303	341	439
Produksi	Ton	4.615	3.890	5.914	5.917	7.186	8.768
Alpukat							
Pohon	Ha	9.886	9.972	15.983	16.315	61.175	60.371
Produksi	Ton	11.025	11.624	13.362	13.767	80.738	92.384
Duku							
Produksi	batang	4.087	6.190	3.382	14.864	9.430	15.398
Durian							
Produksi	ton	35.141	46.555	39.080	58.449	88.865	134.345
Mangga							
Produksi	ton	76.597	84.292	123.167	263.583	93.503	109.433
Manggis							
Produksi	ton	4.277	5.716	1.448	1.906	2.114	4.504
Pisang							
Produksi	Ton	82.698	115.331	120.125	144.036	108.039	133.457
Rambutan							

URAIAN	SATUAN	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi	Ton	72.945	62.376	58.196	134.211	71.781	155.601
Cengkeh							
Luas	Ha	1.525	36,85	1.359	812	758,12	702,54
Produksi	Ton	119	124	117	87	48,86	53,07
Kelapa							
Luas	Ha	1.812	1.816	1.661	1.061	1.210,86	1.414,76
Produksi	Ton	1.102	931	1.005	639	565,69	570,15
Kopi							
Luas	Ha	35	34,70	99,05	188,39	408,94	507,70
Produksi	Ton	14	2,51	12,77	20,78	19,01	23,89
Tebu							
Luas	Ha	1.659	1.615	1.244	1.064	995,05	899,06
Produksi	Ton	9.313	5.095	4.702	3.782	2.945,17	2.662,59
Jahe							
Luas	Ha	166	239	153	248	263	187
Produksi	Ton	261,50	555,48	256,99	424,27	58.632	43.632
Kencur							
Luas	Ha	7,20	7,97	8,39	16,54	44	24,9
Produksi	Ton	51,65	122,70	75,25	106,20	4.263	5.108
Kelompok Tani		1.171	1.214	1.258	1.299	1.344	1.394
Kelompok Wanita Tani		109	112	118	123	170	182
Gabungan Kelompok Tani		176	176	176	176	176	176
Balai Penyuluh Pertanian		17	17	17	17	17	17
POSLUHDES		176	176	176	176	176	176
Penyuluh Pertanian		47 (PNS) 65 (THL)	63 (PNS) 65 (THL)	52 (PNS) 65 (THL)	49 (PNS) 77 (PPPK)	43 (PNS) 61 (PPPK) 1 (THLTBPP)	36 (PNS) 66 (PPPK) 1 (THLTBPP)

URAIAN	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perikanan						
Perikanan Budidaya (Kg)	1.723.390	1.787.640	1.828.006	1.841.875	1.871.031	1.897.814
Perikanan Tangkap (Kg)	543.720	578.409	579.867	511.673	517.216	521.899
Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	18,13	18,76	20,04	20,26	21,71	22,18
Jumlah Kelompok Binaan	114	117	126	146	152	163
Peternakan						
<i>Produksi</i>						
Daging (Kg)	7.416.400	7.721.979	8.065.887	7.772.525	8.396.132	8.738.693
Sapi	2.634.840	2.616.840	2.874.780	2.401.020	2.412.360	2.398.500
Kerbau	-	-	-	-	-	-

URAIAN	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kambing	279.385	276.991	319.654	264.942	249.030	179.547
Domba	252.228	223.880	242.194	234.755	219.211	266.278
Babi	-	-	-	-	-	-
Ayam Ras (Pedaging + Ras Petelur)	3.284.871	3.599.456	3.617.882	3.946.735	4.513.742	4.886.197
Ayam Buras	916.458	947.530	951.158	868.163	941.023	963.722
Itik	48.618	57.282	60.223	56.912	60.767	44.450
Telur (Kg)	22.226.701	22.913.394	23.269.510	22.762.730	21.621.993	20.613.510
Ayam Ras	20.211.162	20.789.349	21.115.288	20.865.845	20.031.565	19.202.263
Ayam Buras	430.922	433.614	443.246	409.107	380.011	380.341
Itik	590.173	683.946	697.356	703.820	601.745	439.564
Puyuh	994.444	997.485	1.013.620	783.956	608.672	591.342
Susu (Liter)	270.088	288.764	266.826	221.256	206.822	199.304
Kelahiran pedet (ekor)	9.002	9.181	9.272	9.364	9.457	9.522
<i>Populasi (ekor)</i>						
Kuda	170	155	155	144	174	203
Sapi Potong	63.716	64.763	65.404	66.293	66.762	68.130
Sapi Perah	334	322	269	260	232	199
Kerbau	123	113	114	97	84	88
Kambing	25.581	27.006	27.034	28.388	29.728	31.051
Domba	118.659	119.281	120.093	118.535	119.609	120.276
Babi	51.755	51.789	66.737	26.959	20.523	19.371
Ayam Buras	921.824	922.036	924.721	923.136	907.840	882.383
Ayam Ras Petelur	1.849.548	1.911.134	1.913.614	1.918.742	1.891.210	1.739.179
Ayam Ras Pedaging	6.978.175	6.981.975	7.238.150	7.036.300	7.206.800	7.593.658
Itik	75.127	78.367	78.396	78.689	71.473	72.385
Kelinci	12.465	12.585	13.010	13.424	13.772	13.791
Puyuh	513.466	517.149	518.870	441.425	306.100	292.635
<i>Tingkat Kematian Ternak (%)</i>						
Ternak besar	0,00004	0,00006	0,00005	0,00005	0,00006	0,00006
Ternak Kecil	0,00005	0,00005	0,00005	0,00009	0,00008	0,00008
Unggas	0,00007	0,00007	0,00007	0,00007	0,00006	0,00006
Aneka Ternak	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00003	0,00003
Jumlah Kelompok Binaan	222	317	244	425	428	434

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja			Target Kinerja		Capaian Kinerja	
			2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022
	Indikator Tujuan								
1.	Kontribusi Pertanian dalam PDRB	%	13,51	12,90	13,26	13,51	13,52	13,05	12,66
2.	Pola Pangan Harapan	Skor	84,3	85,3	83,1	87,8	88,3	83,2	89,2
	IKU Perangkat Daerah								
1.	Produksi Tanaman Pangan	Ton	472.841	473.937	474.970	475.809	476.791	474.466	514.868
2.	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan	Kw/Ha	65,08	60,44	60,44	61	62	61	62,20
3.	Produktivitas Pertanian Tanaman Hortikultura	Ton/Ha	8,15	10,19	10,19	11	12	13,36	18,70
4.	Produktivitas Pertanian Tanaman Perkebunan	Ton/Ha	0,58	0,61	0,61	0,64	0,67	0,73	0,72
5.	Produksi Daging	Kg	7.721.978	8.065.887	7.772.525	5.646.121	5.928.427	8.142.810	8.738.693
6.	Produksi Telur	Kg	22.913.394	23.269.510	22.762.730	16.288.657	17.103.090	21.669.692	20.613.510
7.	Produksi Susu	Liter	288.764	266.826	221.256	222.362	223.473	212.198	199.304
8.	Ketersediaan Pangan Utama	Kg	484.345	441.069	490.522	491.854	492.311	507.343	548.427
9.	Produksi Perikanan	Kg	2.366.049	2.321.925	2.353.548	2.386.086	2.419.294	2.388.247	2.419.713
10.	Nilai SAKIP	Skor	62,97 (B)	72,48 (BB)	73,87 (BB)	74,48 (BB)	75,48 (BB)	74,34 (BB)	70,70 (BB)
11.	Nilai IKM	Skor	B	B	B	B	B	B	B

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2022

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021-2022		Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022		Rasio Realisasi dan Target Tahun 2021-2022	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
PANGAN								
Persentase lumbung pangan aktif	%	56,52	56,52	60,87	60	62,96	106,16	103,43
Angka Konsumsi Energi (AKE)	kalori/ kapita/ tahun;	1802	1851,4	1861	1921,5	1871,2	103,79	100,55
Angka Konsumsi Protein (AKP)	gram/ kapita/ tahun	50,6	51	51,25	54,1	54,4	106,08	106,15
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	87,42	87,42	87,62	87,63	87,39	100,24	99,74
Prosentase desa rawan pangan	%	28,81	28,81	26,55	14,69	14,69	50,99	55,33
Jumlah pangan segar yang diuji	komoditas; pasar	8 dan 4	8 dan 4	8 dan 4	8 dan 1	9 dan 4	100,00	106,25
PERTANIAN								
Persentase Sarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	%	-	59	65	57	65	96,61	100,00
Sapi	ekor	66.553	66.712	67.446	66.762	68.329	100,07	101,31
Kambing/ Domba	ekor	144.923	149.327	150.521	149.337	151.327	100,01	100,54
Ayam	ekor	9.782.451	10.623.822	10.921.289	10.005.850	10.215.220	94,18	93,53
Kelinci	ekor	13.424	13.558	13.694	13.772	13.791	105,80	104,58
Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	%	-	70	75	70	75	100,00	100,00
Angka kesakitan ternak besar (%)	%	5,57	10	9	5,4	8,1	54,00	90,00
Angka kesakitan ternak kecil (%)	%	10,78	18,4	17,4	10,7	16,5	58,15	94,83
Angka kesakitan unggas (%)	%	10,50	19	17	10,45	15,1	55,00	88,82
Persentase bencana pertanian yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00
Cakupan kelompok tani yang aktif	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021-2022		Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022		Rasio Realisasi dan Target Tahun 2021-2022	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Produksi Perikanan Tangkap	Kg	511.673	516.790	521.958	517.216	521.899	100,08	99,99
Produksi Perikanan Budidaya	Kg	1.841.875	1.869.296	1.897.336	1.871.031	1.897.814	100,09	100,03
Prosentase produk perikanan yang dipromosikan	%	30	30	40	30	46,4	100,00	116,00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dispertan PP

2.4.1 Tantangan

Tantangan pengembangan pelayanan OPD adalah sebagai berikut

1. Belum optimalnya Ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi pertanian
2. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian yang belum maksimal.
3. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu, sehingga terjadi pergeseran musim tanam.
4. Upaya penguatan cadangan pangan masyarakat belum maksimal
5. Pencapaian skor pangan harapan belum maksimal
6. Peningkatan diversifikasi pangan belum maksimal
7. Peningkatan pemberdayaan lembaga penyuluh belum maksimal
8. Peningkatan kemandirian lembaga petani belum maksimal
9. Kerusakan lingkungan mempengaruhi debit waduk
10. Alih fungsi lahan pertanian
11. Harga pakan ikan yang mahal

2.4.2 Peluang

Peluang Pengembangan Pelayanan OPD adalah sebagai berikut

1. Adanya bantuan alsin pertanian
2. Tersedianya bahan pangan yang beranekaragam
3. Diadakan sosialisasi dan pelatihan pengolahan pangan non beras
4. Sosialisasi penanganan hasil panen dan pengemasan hasil-hasil pertanian
5. Menyediakan pasar untuk penjualan hasil - hasil pertanian .
6. Tersedianya bantuan sarana dan prasarana irigasi seperti bantuan pompa air, memperbanyak bangunan sumur resapan dan irigasi air dangkal, serta meningkatkan jumlah pembangunan embung
7. Tersedianya anggaran untuk kegiatan perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi yang rusak, baik JITUT, JIDES, Embung dan saluran-saluran irigasi.
8. Sosialisasi pengolahan hasil - hasil perkebunan.

9. Pengembangan desa mandiri pangan
10. Perencanaan Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi
11. Pembentukan Kawasan Rumah Pangan Lestari
12. Tersedianya tenaga penyuluh
13. Peningkatan kemampuan lembaga petani
14. Besarnya potensi sumberdaya perikanan dan peternakan yang dapat dikembangkan
15. Tersedianya balai pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM perikanan (Contoh : BPPI-Tegal, BPPAP-Jepara, BPPAT-Sukabumi).
16. Adanya sumber-sumber pendanaan dari swadaya masyarakat dan CSR.
17. Banyaknya pedagang pengecer yang memasarkan hasil perikanan.
18. Adanya lembaga yang menangani perijinan usaha perikanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam perencanaan dengan menggunakan *problem solving*. Metode yang digunakan dalam identifikasi permasalahan dalam penyusunan renstra ini adalah dengan melakukan FGD yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Internal OPD dengan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Berikut permasalahan yang ada di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
- 2) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.
- 3) Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data untuk keperluan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sektor pertanian dan pangan
- 4) Masih kurangnya kapabilitas dan kompetensi SDM baik perencanaan, keuangan dan aset maupun pelaksana dilapangan
- 5) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar..

b. Permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Tujuan umum pembangunan pertanian dan pangan adalah peningkatan dan pemerataan dalam penyediaan kebutuhan pangan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani. Berikut merupakan permasalahan yang ada dalam mewujudkan itu semua :

Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Masih adanya serangan OPT terhadap lahan pertanian
2. Lahan pertanian yang beralih fungsi
3. Terbatasnya bibit unggul
4. Kesulitan pemasaran hasil pertanian
5. Informasi pasar harga hasil pertanian belum tersaji secara baik untuk petani

Bidang Perkebunan

1. Belum optimalnya produksi perkebunan
2. Masih kurangnya teknologi dalam peningkatan hasil produksi
3. Masih belum optimalnya pengendalian hama pengganggu pertumbuhan tanaman perkebunan
4. Tidak ada kepastian harga terhadap produksi perkebunan

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluh

1. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air.
2. Masih rendahnya Prasarana (Irigasi Tersier) pertanian dalam kondisi Baik, Tahun 2022 sebesar 30,34% (455.220m/1.500.191m)
3. Jumlah Penyuluh 43 (PNS) 66 (P3K) pada tahun 2022 belum sebanding dengan jumlah desa 177 demikian juga terkait dengan kapasitas penyuluh

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Belum optimalnya pengendalian penyakit ternak.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana peternakan.
3. Belum optimalnya produksi dan produktivitas peternakan di Kabupaten Karanganyar.
4. Belum optimalnya fungsi Rumah Pemotongan Hewan.

Bidang Ketahanan Pangan

1. Masih rendah angka konsumsi energi di Kabupaten Karanganyar, tahun 2022 sebesar 1871,2 Kalori/kapita/tahun jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 2.018 Kalori/kapita/tahun
2. Belum optimalnya angka kecukupan protein, tahun 2022 AKP 54,4 Kalori/kapita/tahun sementara AKP Jateng 59,8 Kalori/kapita/tahun

3. Belum optimalnya Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2022 sebesar 87,39 lebih rendah dibandingkan IKP Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 94,4
4. Belum semua pelaku usaha memiliki PSAT PDUK

Bidang Perikanan

1. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya
2. Kurangnya promosi produk-produk unggulan hasil perikanan.
3. Kurang tersedianya benih dan induk ikan unggul.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam budidaya dan pengolahan hasil ikan.
5. Rendahnya tingkat konsumsi ikan, tahun 2022 diketahui rata-rata konsumsi sebesar 22,18 Kg, per kapita / tahun

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh,
2. Masih rendahnya kualitas SDM petani,
3. Masih kurangnya Balai Penyuluh Pertanian dalam kondisi baik

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemerataan dan penganekaragaman pangan dalam Pemenuhan kebutuhan masyarakat	1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian di Kabupaten Karanganyar 2. Masih kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana pertanian 3. Rendahnya kesejahteraan dan kualitas SDM dari sektor pertanian 4. Masih lemahnya kelembagaan petani 5. Masih kurangnya diversifikasi pangan di tingkat masyarakat. 6. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air 2. Belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional 3. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani 4. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh 5. Masih rendahnya kualitas SDM petani 6. Masih rendahnya akses permodalan dan pemasaran petani 7. Semakin berkurangnya tenaga kerja di bidang pertanian dan rendahnya minat generasi muda bekerja di bidang pertanian
	Rendahnya kesejahteraan pelaku perikanan dan peternakan	1. Tingginya biaya produksi perikanan budidaya 2. Terbatasnya akses permodalan 3. Adanya kesenjangan pendapatan masyarakat perikanan. 4. Rendahnya produktivitas perikanan budidaya dan usaha perikanan	1. Tingginya harga pakan ikan 2. Kurangnya pengetahuan, ketrampilan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. 3. Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang perikanan. 4. Terbatasnya sapras bidang perikanan. 5. Kurangnya variasi jumlah olahan produk perikanan. 6. Kurang tersedianya benih dan induk ikan unggul.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah”, untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial;
- 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong-royongan;
- 3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal;

4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi;
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan.

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pertanian, pangan dan kelautan perikanan. Tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar terkait dengan sasaran ketiga Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yaitu meningkatkan kualitas perekonomian daerah berbasis kekuatan lokal. Beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<i>Tujuan:</i> Meningkatkan Daya Saing Daerah <i>Sasaran:</i> Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian di Kabupaten Karanganyar 2. Masih kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana pertanian 3. Rendahnya kesejahteraan dan kualitas SDM dari sektor pertanian 4. Masih lemahnya kelembagaan petani 5. Masih kurangnya diversifikasi pangan di tingkat masyarakat. 6. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1. Alih fungsi lahan 2. Anomali Iklim 3. Serangan OPT 4. Belum tercukupinya kebutuhan benih yang berkualitas 5. Terbatasnya Sarana Prasarana pendukung 6. Rendahnya kualitas SDM petani 7. Menurunnya minat generasi muda bekerja di bidang pertanian	1. Komitmen pimpinan beserta jajarannya dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas 2. Peningkatan kualitas SDM pelaku pertanian 3. Kemajuan teknologi pendukung pertanian dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		7. Tingginya biaya produksi perikanan budidaya 8. Terbatasnya akses permodalan 9. Adanya kesenjangan pendapatan masyarakat perikanan. 10. Rendahnya produktivitas perikanan budidaya dan usaha perikanan	1. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi untuk meningkatkan sektor perikanan 2. Harga Pakan ikan yang tinggi	3. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan stakeholder bidang kelautan dan perikanan 4. Adanya kebijakan kepala daerah untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan sektor perikanan dan peternakan

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

3.3 Telaahan Renstra Kementerian

3.3.1. Kementerian Pertanian

Dalam rangka memberikan masukan dalam perumusan isu strategis salah satunya adalah memperhatikan dokumen Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024. **Visi Kementerian Pertanian** adalah:

***“ Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern
untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Sedangkan **Misi Kementerian Pertanian** adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan ketahanan pangan,
- 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian,
- 3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kementerian Pertanian, maka **tujuan pembangunan pertanian** periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu :

- 1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan,
- 2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian,
- 3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran Strategis dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai Kementerian Pertanian dalam periode Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
Indikator kinerja : peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
Indikator kinerja :
 - pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional,
 - persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan.
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
Indikator kinerja :
 - persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional,
 - persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
Indikator kinerja :
 - persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan
 - teknologi yang diterapkan oleh pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
Indikator kinerja :
 - indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan
 - indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
Indikator kinerja :
 - persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani,
 - persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis,
 - persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
Indikator kinerja :
 - persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya,

- persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
- Indikator kinerja : nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas
- Indikator kinerja : nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Berdasar Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian di Kabupaten Karanganyar	- Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian	- Keragaman hayati dan agroekosistem
2.	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional	2. Masih kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana pertanian	- Serangan OPT	- Lahan pertanian yang luas
3.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	3. Rendahnya kesejahteraan dan kualitas SDM dari sektor pertanian	- Belum tercukupinya kebutuhan bibit maupun benih yang berkualitas	- Teknologi pertanian yang berkembang dengan pesat
4.	Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian	4. Masih lemahnya kelembagaan petani	- Keterbatasan dukungan dana	- Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah
5.	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	5. Masih kurangnya diversifikasi pangan di tingkat masyarakat.	- Kurang terbukanya akses / jaringan pemasaran	- Menjalin kemitraan dalam rangka mempromosikan produk pertanian dan peternakan
6.	Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan	6. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	- Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Prasarana pendukung pertanian serta peternakan	- Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional		- Keterbatasan SDM baik kuantitatif maupun kualitatif	- Majunya ilmu pengetahuan yang berkembang pesat
			- Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani dan Kelompok Ternak belum optimal	- Dukungan organisasi / kelembagaan non pemerintah (LSM / HKTI / KTNA/ Asosiasi / Koperasi Tani / Gapoktan/ Kelompok Tani / Kelompok Ternak / P3A / GP3A)

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
8.	Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima			
9.	Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas			

3.3.2. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dokumen Renstra tersebut sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang termuat dalam dokumen Renstra tersebut adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”***.

Adapun misi yang akan dijadikan pedoman dalam mewujudkan visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
 - b. menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, dengan tujuan:
 - a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan.

Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, terdiri dari:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
- SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;

- SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
- SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;
- SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunan Peta Strategi, KKP menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, dengan Peta Strategi sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
SS 1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP)	59,16				63,87
CUSTOMERS PERSPECTIVE						
SS 2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat						
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,9				8,71
3	Nilai Ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,17				8,0
4	Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	56,39				62,05
SS 3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan						
5	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	64				80
6	Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)	23,4				26,9
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat						
7	Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) pemerintah (%)	60				75
8	Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya (kelompok per tahun)	1500	1500	1500	1500	1500
SS 5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan						
9	Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/ diterapkan (hasil riset)	5				15
SS 6. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab						

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
10	WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola	3				11
11	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	24				12
12	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	94				98
SS 7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing						
13	Produksi perikanan (juta ton)	26,46				32,75
14	Produksi garam nasional (juta ton)	3				3,4
15	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil (triliun rupiah)	2,8				4,2
16	Kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan (kawasan)	5				50
SS 8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif						
17	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	54				75
18	Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan (%)					93
19	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	77				82
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE						
SS 9. Tata kelola pemerintahan yang baik						
20	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	71				75
21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88				90

Kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020-2024, terdiri dari:

1. memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan, dilaksanakan dengan strategi, antara lain:

- a. membuka komunikasi dengan stakeholders untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual;
- b. optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI, termasuk optimalisasi kelembagaannya, baik WPPNRI di laut maupun perairan darat;
- c. penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok sumber daya ikan sebagai basis pengelolaan sumber daya ikan yang maju dan berkelanjutan;
- d. perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait;
- e. pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port), dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (Major Project RPJMN 2020-2024), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
- f. eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
- g. fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, serta optimalisasi peran BLU-LPMUKP/Bank Nelayan;
- h. peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, dan perlindungan HAM Perikanan;
- i. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (Major Project RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BUMN, pemerintah daerah, dan swasta;
- j. pengelolaan perikanan di perairan umum;
- k. pengembangan armada perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;

- l. partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs);
 - m. pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
 - n. pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
 - o. penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
2. mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat, dilaksanakan dengan strategi, antara lain:
- a. akselerasi peningkatan produksi aquaculture/perikanan budidaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya;
 - b. pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (*Major Project* RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha/swasta;
 - c. pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting di semua tipologi ekosistem yaitu laut, payau, dan tawar untuk pemenuhan konsumsi domestik, sumber devisa negara dan keberlanjutan lingkungan. Komoditas utama antara lain udang, nila, lele/patin, bandeng, dan rumput laut;
 - d. pengembangan pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan buatan dan pakan alami;
 - e. pengembangan sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana balai benih ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan broodstock center, serta modernisasi teknologi;
 - f. pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan termasuk di kawasan minapolitan dan SKPT didukung dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern;
 - g. pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budidaya yang dilakukan antara lain melalui surveillance hama dan penyakit ikan, pengujian residu produk

- perikanan budidaya, modernisasi sarana laboratorium, dan pembangunan pusat kesehatan ikan terpadu;
- h. pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya di bidang pembesaran, pembenihan, dan pakan;
 - i. pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi, instalasi listrik, dan keramba jaring apung;
 - j. peningkatan kerja sama dan sinergisitas kebijakan, program, anggaran, dan data perikanan budidaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lintas sektoral di tingkat nasional maupun internasional;
 - k. penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudi daya ikan melalui pemberian stimulus usaha, fasilitasi skema pembiayaan yang murah dan mudah, sertifikasi lahan, asuransi usaha perikanan budidaya, serta pendampingan teknis;
 - l. pengaturan akses perizinan dan investasi usaha perikanan budidaya yang mudah dan murah bagi pelaku usaha serta didukung dengan regulasi yang kondusif;
 - m. pengembangan SKPT; dan
 - n. penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan budidaya.
3. membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi, antara lain :
- a. peningkatan kualitas, kapasitas, dan produktivitas industri pengolahan ikan/udang, dan rumput laut;
 - b. peningkatan standardisasi, ketelusuran (traceability), jaminan mutu, dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
 - c. penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, pemetaan, dan pemantauan logistik hasil perikanan;
 - d. pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan dan penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI);

- e. pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan;
- f. peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
- g. pelaksanaan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi stunting;
- h. perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala internasional, penguatan branding produk kelautan dan perikanan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor;
- i. pembinaan dan pengelolaan pasar ikan, pengembangan kawasan pengolahan, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (Major Project RPJMN 2020-2024) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
- j. pemetaan preferensi, konsumsi, dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri;
- k. peningkatan partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan dan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG);
- l. penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil kelautan dan perikanan, Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan;
- m. peningkatan unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan;
- n. pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste;
- o. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan;
- p. peningkatan ragam baru (diversifikasi) produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri rumput laut, dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
- q. fasilitasi kemudahan pelaku usaha untuk berinvestasi, mengakses pembiayaan, teknologi dan pasar, serta didukung regulasi yang kondusif;

- r. pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - s. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan kawasan usaha;
 - t. harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi, dan ketelusuran produk (traceability);
 - u. pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;
 - v. penguatan laboratorium acuan penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan, serta jejaring laboratorium keamanan pangan hasil perikanan;
 - w. peningkatan layanan sertifikasi ekspor/impor/domestik berbasis elektronik, penyederhanaan layanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik;
 - x. pengembangan SKPT; dan
 - y. penguatan Unit Pelaksana Teknis mutu hasil perikanan dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
4. pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, dilaksanakan dengan strategi, antara lain :
- a. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan melalui upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon pesisir dan laut;
 - b. perbaikan dan peningkatan kualitas eksosistem pesisir yang rusak melalui kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;
 - d. peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, rehabilitasi mangrove, dan terumbu karang;
 - e. peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan;
 - f. penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran KKP dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut;

- g. peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar;
- h. peningkatan produktivitas dan kualitas garam nasional disertai dengan pengelolaan garam dari hulu ke hilir di sentra ekonomi garam;
- i. pengelolaan kawasan wisata bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
- j. peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi;
- k. pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- l. pemanfaatan air laut, pengelolaan biofarmakologi, dan peningkatan pemanfaatan marine bioproduct dan bioteknologi;
- m. penguatan sistem perizinan pemanfaatan ruang laut;
- n. penyelesaian perencanaan ruang laut meliputi rencana zonasi kawasan laut, rencana zonasi wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, rencana aksi dan peninjauan kembali, serta penyelarasannya dengan rencana tata ruang;
- o. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya antara lain melalui pelaksanaan perizinan lokasi perairan dan penyelenggaraan kadaster laut;
- p. peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan SDKP;
- q. operasional armada pengawasan SDKP;
- r. penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya);
- s. peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP;
- t. pengembangan SDM aparatur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
- u. peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- v. operasional pengawasan ekspor, impor, dan domestik;
- w. harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dalam dan luar negeri, sinergi pengawasan lalu lintas ikan, penguatan pengawasan karantina ikan di lintas batas negara (darat/laut), dan bandara/pelabuhan;

- x. penguatan operasional pengawasan dan penindakan pelanggaran dibidang karantina ikan dan keamanan hayati ikan;
 - y. peningkatan sarana dan prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, karantina ikan, dan laboratorium uji (reference dan destructive fishing);
 - z. pengembangan SKPT; dan
 - aa.peningkatan Unit Pelaksana Teknis pengelolaan ruang laut, Unit Pelaksana Teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan Unit Pelaksana Teknis karantina ikan.
5. penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi, antara lain :
- a. peningkatan riset untuk menyediakan data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan (*stock assessment*) di WPPNRI dan Perairan Umum Daratan (PUD);
 - b. peningkatan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan Hak Kekayaan Intelektual (KHI)/paten dengan pemerintah daerah, UKM, dan dunia usaha dan industri;
 - c. peningkatan dukungan riset dan teknologi dalam pengambilan kebijakan science based policy untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan;
 - d. peningkatan hasil riset dan inovasi teknologi yang mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, serta peningkatan adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan;
 - e. pengembangan pusat unggulan riset sehingga menjadi center of excellence dalam riset dan inovasi teknologi kelautan dan perikanan;
 - f. pengembangan kurikulum pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan teaching factory dan memperkuat link and match berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, serta menumbuhkan wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan;
 - g. pengembangan sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan standar internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;

- h. pengembangan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri berkerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi bidang kelautan dan perikanan;
- i. perluasan jangkauan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang berbasis digital (e-learning, e-training, e-extension);
- j. pengembangan kelembagaan pendidikan vokasi, pelatihan, dan riset kelautan dan perikanan;
- k. penguatan sistem penyuluhan berbasis hasil riset Research Extension Linked (REL) untuk mendukung program kementerian dan kebijakan peningkatan produktivitas kelautan dan perikanan, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- l. peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai standar nasional dan internasional, termasuk peningkatan kapasitas tenaga peneliti, pendidik, pelatih, dan penyuluh;
- m. peningkatan kerja sama dan sinergitas riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dengan lembaga nasional dan internasional;
- n. peningkatan kapasitas UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, meliputi:

1. Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB);

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan/goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB nomor 14, yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya :

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;

- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- c. mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan;
- d. meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e. mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- f. melestarikan wilayah pesisir dan laut;
- g. mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- h. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air, dan pariwisata berkelanjutan;
- i. meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;
- j. menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan
- k. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam *The United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

KKP juga mendukung pencapaian target TPB nomor 2, yaitu Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), dan TPB nomor 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*).

2. Gender;

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dimana Pengarustamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. KKP telah melaksanakan PUG yang diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di sektor kelautan dan perikanan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan

pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup:

- a. penguatan tujuh prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG), yakni: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat;
- b. penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. penyiapan roadmap PUG;
- d. pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit kerja eselon I di KKP dan antara pusat dan daerah;
- e. pembuatan profil gender; dan
- f. monitoring dan evaluasi serta pengawasan PUG KKP.

Beberapa program dan kegiatan responsif gender diantaranya adalah bimbingan teknis dan bantuan pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan nelayan, bantuan sarana produksi peralatan pengolahan produk kelautan dan perikanan, penguatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan usaha garam rebus, bantuan paket usaha perikanan budidaya, alih teknologi hasil riset pengolahan, dan pemanfaatan hasil perikanan

3. Modal sosial budaya;

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya :

- a. pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal, dan keragaman SDA hayati;

- b. pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan
- c. fasilitasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data penerapan SPBE KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis web (*on-line*), serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

Pengarustamaan dalam Renstra 2020-2024 KKP tersebut mengacu pada RPJMN 2020-2024 sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar memiliki kewajiban untuk mendukung upaya pencapaian target-target yang telah ditentukan. Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target tersebut tentunya ditemui faktor-faktor penghambat atau faktor pendorong yang ada pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar. Hal-hal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra KKP RI beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KKP RI	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	Belum adanya data yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat KP	BPS selaku instansi resmi yang mengeluarkan data tidak bersedia melakukan kerjasama	-
2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan penduduk Kabupaten Karanganyar	Kesadaran masyarakat akan manfaat ikan masih rendah	- Produksi perikanan meningkat - Produksi perikanan menjadi salah satu indikator kunci pembangunan daerah
3	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Tidak memiliki kewenangan di wilayah pesisir dan laut	-	-
4	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	Data serapan lulusan pendidikan dan pelatihan tidak tersedia	Keterbatasan SDM	
5	Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan	Keterbatasan SDM	Keterbatasan SDM	-
6	Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab	Keterbatasan SDM	Keterbatasan SDM	-
7	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Dana tersalurkan untuk usaha perikanan dan kelautan belum terdata dengan baik	Keterbatasan SDM	- Pendataan produksi perikanan selalu dilaksanakan setiap tahun - Adanya petugas pendampingan penyaluran dana yang berasal dari KKP
8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Keterbatasan SDM	Keterbatasan SDM	
9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tidak ada masalah	-	Pelaporan dan evaluasi rutin dilaksanakan

3.4

Telaahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

3.4.1

Telaahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2018 – 2023 adalah :

- Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah.
- Meningkatkan tata Kelola organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan yang akan dicapai selama periode tahun 2018 – 2023 adalah :

- Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
- Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan.
- Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 3.6.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Berdasar Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah PD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah				
1.	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	- Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian - Infrastruktur dan sarana prasarana pertanian masih terbatas - Keterbatasan SDM petani dan petugas - Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada	- Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian - Serangan OPT - Belum tercukupinya kebutuhan bibit maupun benih yang berkualitas - Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Prasarana pendukung pertanian - Keterbatasan SDM baik kuantitatif maupun kualitatif - Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani belum optimal	- Keragaman hayati dan agroekosistem - Lahan pertanian yang luas - Teknologi pertanian yang berkembang dengan pesat - Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah - Majunya ilmu pengetahuan yang berkembang pesat - Dukungan organisasi / kelembagaan non pemerintah (LSM / HKTI / KTNA/ Asosiasi / Koperasi Tani / Gapoktan/ Kelompok Tani / P3A / GP3A)
2.	Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan			

3.4.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, Tujuan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100).

Dipilihnya indikator Skor PPH, karena meskipun pangan tersedia dalam jumlah yang cukup bahkan berlebih namun bila tidak dapat terjangkau dan dikonsumsi, maka belum dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia. Untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif dan berkelanjutan, manusia harus mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan indikator PPH Ketersediaan (skor), Angka Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) dan Angka Konsumsi Protein (gram/kapita/hari).

Tabel 3.7.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Berdasar Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah PD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah				
1.	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	- Ketersediaan pangan daerah belum sesuai yang ditargetkan Pemerintah Pusat	- Keterbatasan dukungan dana - Masih kurangnya diversifikasi	- Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan

No	Sasaran Jangka Menengah PD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
		- Masih kurangnya keanekaragaman pangan menuju gizi seimbang	pangan di tingkat masyarakat	cadangan pangan daerah - Komitmen pimpinan beserta jajarannya dalam upaya diversifikasi pangan

3.4.3 Telaahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 adalah meningkatkan pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan.

Sedangkan, sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatnya produksi daging, susu dan telur, dengan indikator sasarannya adalah jumlah produksi daging, susu dan telur di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.8.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Berdasar Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah PD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah				
1.	Meningkatnya produksi : Daging Susu Telur	- Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas peternakan - Infrastruktur dan sarana prasarana peternakan masih terbatas - Keterbatasan SDM petani dan petugas - Belum optimalnya fungsi kelembagaan yang ada	- Kurangnya bibit ternak yang berkualitas - Kurangnya pakan ternak yang baik - Kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung peternakan - Keterbatasan SDM baik kuantitatif maupun kualitatif - Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Ternak belum optimal	- Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah - Majunya ilmu pengetahuan yang berkembang pesat - Dukungan organisasi / kelembagaan non pemerintah (Kelompok Ternak)

3.4.4 Telaahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Sub Sektor Perikanan.
2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan

Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan
2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah PD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan: Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Sub Sektor Perikanan Sasaran: Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.	Belum optimalnya tingkat produksi perikanan Belum optimalnya cakupan pembinaan kelompok dibidang perikanan	• Masih rendahnya produksi dan produktiivitas perikanan budidaya • Kurangnya bibit ikan yang berkualitas • Rendahnya kualitas SDM perikanan • Ketergantungan terhadap bahan baku pakan pabrikan	• Potensi pakan alternatif perikanan. • Adanya kelompok pembudidaya ikan

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, kawasan peruntukan pertanian terdiri atas : kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 22.477 Ha dan kawasan pertanian lahan kering seluas 12.927 Ha. Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 6.351 Ha,

Strategi pemantapan kawasan pertanian terpadu meliputi :

- a. mengelola sistem irigasi dengan baik, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan status irigasi;
- b. menjaga intensitas tanam dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian;
- c. mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk penggunaan bukan pertanian;
- d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian;
- e. menggunakan teknologi dan modernisasi dalam pengelolaan pertanian;
- f. mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan secara terpadu melalui sistem agrobisnis; dan
- g. mengembangkan insentif dan disinsentif untuk mendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi:

- a. Sungai, seluruh perairan badan sungai di wilayah kabupaten; dan
- b. Bendungan/danau/embung yang terdapat di seluruh kecamatan.

Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi:

- a. Kolam, terletak di Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, Jumantono, Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo dan Jenawi; dan
- b. Sungai dengan luas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar yang terdapat di seluruh kecamatan; dan
- c. Bendungan/embung yang terdapat di seluruh kecamatan.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya sebagaimana pada Tabel 3.10 berikut ini :

Tabel 3.10
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar
Terhadap Telaahan RTRW Kabupaten Karanganyar

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana Kawasan Pertanian	a. Implementasi pruntukan wilayah untuk pertanian belum maksimal	a. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat b. Kebutuhan lahan untuk perumahan semakin meningkat c. Kurangnya penagakan perda RTRW	a. Kebutuhan penuhan kebutuhan pangan yang semakin meningkat b. Kebijakan Menteri Pertanian tentang penerapan pengembangan pertanian berbasis kawasan c. Perda LP2B sedang dalam proses penyusunan
	Kawasan peruntukan perikanan tangkap Kawasan peruntukan perikanan budidaya	Kurangnya alokasi lahan bagi Kawasan Peruntukan Perikanan apabila dibandingkan dengan besarnya potensi SDA dan SDM perikanan	Adanya regulasi yang membatasi pemanfaatan lahan bagi kegiatan perikanan (Perda RTRW)	Adanya kebijakan daerah yang mendukung pembangunan bidang kelautan dan perikanan

3.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tahun 2018-2023 tidak menimbulkan dampak lingkungan yang besar.

3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar yang meliputi analisa renstra Kementerian, analisa Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah, analisa Rencana tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Belum optimalnya skor pola pangan harapan
2. Belum optimalnya Produktivitas pertanian
3. Belum optimalnya Produksi Perikanan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar yaitu :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi

4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Berikut sasaran dalam Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

1. Meningkatnya konsumsi masyarakat dalam pemenuhan pangan
2. Meningkatnya produktivitas pertanian utama khususnya padi
3. Meningkatnya produktivitas perikanan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam **Tabel 4.1** sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun			Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,87	5,90	6,00	6,15	6,20	6,20
	Meningkatnya konsumsi masyarakat dalam pemenuhan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89,20	84,30	90,00	90,50	91,00	91,00
	Meningkatnya produktivitas pertanian utama khususnya padi	Produktivitas Pertanian Utama Per hektar Per tahun (Padi)	Ton/Ha	6,22	6,22	6,22	6,23	6,24	6,24
	Meningkatnya produktivitas perikanan	Produktivitas Perikanan	Kg/m ²	6,6	6,7	6,8	7,00	8,00	8,00
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas Dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63	64	65	67	70	70
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	74,34 (2021)	76,48	76,73	76,98	77,23	77,23

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dengan melakukan distribusi pangan secara merata
2. Meningkatkan produksi tanaman pangan utama melalui peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3. Melakukan peningkatan produktivitas dengan peningkatan kapasitas SDM, Peningkatan sarpras perikanan, Fasilitasi akses permodalan dan Penggunaan teknologi tepat guna
4. Meningkatkan kinerja pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.

5.2 Kebijakan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Kebijakan pembangunan pertanian, pangan dan perikanan di Kabupaten Karanganyar diarahkan pada :

1. Mendorong ketahanan pangan masyarakat dan pemerintah diprioritaskan pada daerah yang memiliki kerentanan dalam penyediaan pangan
2. Peningkatan hasil produksi pertanian dengan prioritas tanaman pangan utama
3. Pembangunan dan optimalisasi pengelolaan air irigasi pertanian dan penyediaan alat mesin pertanian
4. Pengembangan kualitas SDM petani dan penyuluh dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani
5. Pembangunan/Rehabilitasi sarpras perikanan dengan fokus pengadaan bibit unggul dan penyediaan pakan
6. Peningkatan kualitas dan disiplin sumber daya aparatur pemerintah

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya konsumsi masyarakat dalam pemenuhan pangan	Peningkatan ketersediaan dengan melakukan distribusi pangan secara merata	Mendorong ketahanan pangan masyarakat dan pemerintah diprioritaskan pada daerah yang memiliki kerentanan dalam penyediaan pangan	• Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat • Program penanganan kerawanan pangan • Program pengawasan keamanan pangan
	Meningkatnya produktivitas pertanian utama khususnya padi	Meningkatkan produksi tanaman pangan utama melalui peningkatana infrastruktur dan sarana pertanian	Peningkatan hasil produksi pertanian dengan prioritas tanaman pangan utama Pembangunan dan optimalisasi pengelolaan air irigasi pertanian dan penyediaan alat mesin pertanian Pengembangan kualitas SDM petani dan penyuluh dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani	• Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian • Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian • Program pengendalian kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner • Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian • Program penyuluhan pertanian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
	Meningkatnya produktivitas perikanan	Melakukan peningkatan produktivitas dengan peningkatan kapasitas SDM, Peningkatan sarpras perikanan, Fasilitasi akses permodalan dan Penggunaan teknologi tepat guna	Pembangunan / Rehabilitasi sarpras perikanan dengan fokus pengadaan bibit unggul dan penyediaan pakan	• Program pengelolaan perikanan budidaya • Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan • Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas Dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kinerja pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.	Peningkatan kualitas dan disiplin sumber daya aparatur pemerintah	• Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan sasaran Meningkatnya konsumsi masyarakat dalam pemenuhan pangan, Meningkatnya produktivitas pertanian utama khususnya padi, Meningkatnya produktivitas perikanan dan Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Indikator kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun			Target Akhir Renstra
			Capaian 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89,20	84,30	90,00	90,50	91,00	91,00
2	Produktivitas Pertanian Utama Per hektar Per tahun (Padi)	Ton/Ha	6,22	6,22	6,22	6,23	6,24	6,24
3	Produktivitas Perikanan	Kg/m ²	6,6	6,7	6,80	7,00	8,00	8,00
4	Nilai SAKIP OPD	Nilai	74,34 (Tahun 2021)	76,48	76,73	76,98	77,23	77,23

Tabel 7.2
Indikator Program Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024-2026

Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun			Target Akhir Renstra
			2022	2023	2024	2025	2026	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Konsumsi Energi (AKE)	kalori/ kapita/ tahun	1871,2	1875	1940	1945	1950	1950
	Angka Konsumsi Protein (AKP)	gram/ kapita/ tahun	54,4	55	55,5	56	56,5	56,5
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	87,39	87,82	88	88,5	90	90
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan pangan	%	14,69	14,69	14,12	13,56	12,99	12,99
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pelaku usaha PSAT-PDUK yang memiliki sertifikat	%	22,64	30,19	37,74	45,28	52,83	52,83
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	kg	1.897.814	1.925.796	1.935.425	1.945.102	1.954.828	1.954.828
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Perairan Umum Daratan yang diawasi	%	17,14	20	25	30	35	35

Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun			Target Akhir Renstra
			2022	2023	2024	2025	2026	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produk perikanan yang dipromosikan	%	46,4	50	60	65	75	75
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	83,97	84	85	86	87	87
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi tanaman pangan utama							
	Padi	Ton	342.002	342.050	342.090	342.110	342.130	342.130
	Jagung	Ton	22.441	22.452	20.885	20.920	21.080	21.080
	Produksi pertanian hortik unggulan							
	Jahe	Ton	4.363	4.364	4.365	4.390	4.409	4.409
	Buah (Durian)	Ton	13.435	13.460	13.470	13.500	13.560	13.560
	Produksi perkebunan unggulan							
	Kopi	Ton	16,30	22	27,00	27,50	28,10	28,10
	Tembakau	Ton	59,80	60,6	61,00	62,20	63,50	63,5
	Jumlah populasi Sapi	ekor	68.329	68.255	68.566	68.909	69.254	69.254
	Jumlah Populasi Kambing/Domba	ekor	151.327	151.876	153.395	154.929	156.478	156.478
	Jumlah Populasi Ayam	ekor	10.215.220	11.238.066	11.575.208	11.690.960	12.041.689	12.041.689
	Jumlah Populasi Kelinci	ekor	13.791	13.371	13.438	13.505	13.573	13.573
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	%	30,34	30,68	31,01	31,34	31,68	31,68
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Angka kesakitan ternak besar (%)	%	8,1	8	7,9	7,7	7,6	7,6
	Angka kesakitan ternak kecil (%)	%	16,5	16,4	16,2	16,1	16	16
	Angka kesakitan unggas (%)	%	15,1	15	14,8	14,7	14,5	14,5
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan kelompok tani yang aktif	%	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024-2026

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Tahun			Target Akhir Renstra
			2024	2025	2026	
1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	90,00	90,50	91,00	91,00
2	Produktivitas Pertanian Utama Per hektar Per tahun (Padi)	Ton/Ha	6,22	6,23	6,24	6,24
3	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	10	9	8	8
4	Produksi peternakan utama (daging sapi, daging ayam dan telur ayam	kg	21.934.778	23.031.517	24.183.092	24.183.092
5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	1.000 ton	2,37	2,41	2,45	2,45
6	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Tahun	23	23,50	24	24

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan profil Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna /masyarakat untuk memberikan informasi dan data-data penting di bidang pertanian dan pangan yang merupakan potret potensi pertanian di Kabupaten Karanganyar. Selain itu, profil juga dapat digunakan sebagai sarana promosi guna menarik investor ,pengambilan kebijakan dan perencanaan kegiatan mendatang.